

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini melihat wacana *rape culture* dalam film *Women From Rote Island*. Fenomena yang diangkat adalah bagaimana realitas media memvisualisasikan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam bingkai sosial-budaya masyarakat Rote yang sarat nilai adat dan struktur patriarki. Visualisasi tersebut tidak dilihat sebagai bentuk penghakiman terhadap budaya lokal, melainkan sebagai upaya memahami bagaimana nilai-nilai adat serta peran gender tradisional berperan dalam membentuk representasi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan di layar. Wacana ini menjadi relevan ditelisik menggunakan metode analisis wacana kritis milik Sara Mills dengan pemetaan kekerasan seksual menggunakan piramida *rape culture* versi 4 Jaime & Cervix. Tujuannya adalah untuk membongkar posisi pihak yang mendominasi dan yang terdominasi secara komprehensif dalam konstruksi makna film.

Film Indonesia kerap mengangkat isu yang bervariasi, mulai dari politik, sosial, dan budaya. Salah satu isu yang banyak dikumandangkan ialah soal gender, khususnya pada representasi perempuan dan relasi kuasa dalam lingkup sosial budaya. Karena pada dasarnya penggambaran perempuan dalam suatu film didasari oleh norma budaya, nilai-nilai agama dan sosial ekonomi yang dipilih oleh sutradara (Andriani, 2024, p. 65). Kecendrungan penggambaran ini membentuk wacana yang secara tidak langsung menormalisasi ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam cara masyarakat memandang dan merespons

kekerasan seksual. Hal ini membuka pintu munculnya wacana *rape culture* dalam karya sinema Indonesia.

Rape Culture itu sendiri adalah budaya yang memandang kekerasan seksual, pemerkosaan adalah suatu hal yang wajar, seperti menyepelekan kasus pemerkosaan dan menganggap korban sebagai pihak yang salah. Riki dan Alaydrus menyatakan bahwa budaya pemerkosaan atau *rape culture* mengacu pada lingkungan atau masyarakat yang menganggap remeh kekerasan seksual (Permatasari & Amalia, 2022, p. 926). Istilah *rape culture* berarti melihat kekerasan seksual seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa. Namun penting diingat bahwa pelaku tetaplah pihak yang bersalah, tidak ada alasan pembenaran apapun bagi pelaku (Adiyanto & Sabrina, 2023, pp. 49–50).

Kekerasan seksual mencakup semua jenis perilaku, verbal atau non-verbal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan niat memanipulasi, mendorong orang lain untuk terlibat dalam perilaku seksual yang tidak diinginkan (Nirmala Ni & Zuhri Saiffudin, 2023, p. 10371). Rape Culture dapat ditemukan dalam perjalanan sejarah film Indonesia, yang sejak awal mencerminkan konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan sesuai konteks masanya.

Menurut Garin Nugroho dan Dyna Herlina perkembangan film di Indonesia terbagi dalam enam periode, yakni tahapan seni kaum urban tahun 1900-1930, tahapan film dianggap sebagai hiburan di tengah kepenatan ekonomi dunia tahun 1930-1950, tahapan konflik ideologi tahun 1950-1970, tahapan globalisme semu

tahun 1970-1985, kemudian tahapan krisis di tengah globalisasi tahun 1985-1998, dan tahapan euforia demokrasi tahun 1998-2013 (Ardiyanti, 2017, p. 168).

Awal kemunculan film di Indonesia dimulai dari tahapan seni kaum urban (1900-1930). Tahun 1926 film pertama Indonesia dikumandangkan berjudul *Loetoeng Kasaroeng*, yang diangkat dari cerita rakyat Sunda. Kemudian pada tahun 1929 berdirilah perusahaan film Halimoen Film dengan Lily Van Java sebagai karya debutnya. Pada tahapan ini, film Indonesia memang masih dipengaruhi oleh budaya kolonial dan pengerjaannya masih dipegang oleh pihak asing, seperti Wong Brother's asal Shanghai yang membuat film *Njai Siti* atau *De Stem Des Bloeds* pada tahun 1930 (Ardiyanti, 2017, p. 168). Dapat dikatakan film pada masa ini merepresentasikan masyarakat dalam konteks kolonial dan patriarkal, di mana perempuan ditampilkan sebagai sosok penurut dan tunduk pada laki-laki.

Tahapan kedua tahun 1930-1950, perkembangan film memunculkan kemajuan dengan terciptanya film bersuara, yakni *Boenga Roos* dari Tjikembang (1931) garapan The Teng Chun. Lalu film bersuara lainnya yang diproduksi oleh Halimoen Film berjudul *Indonesia Malaise* dan film karya Albert Balink berjudul *Terang Boelan* atau *Het Eiland De Droomen* (1937), yang disukai oleh penonton kelas bawah karena mengangkat cerita lokal. Pada periode ini film berkembang pesat tahun 1939-1941 tercatat 49 judul (Ardiyanti, 2017, p. 168). Tahun 1942, Jepang mengambil alih perusahaan film milik Hindia Belanda dan kemudian membentuk Nippon Eiga Sha (Lembaga Produksi Film) (Fahmi & Aji, 2022, p. 4). Terdapat tiga film yang dibuat oleh Nippon Eiga Sha, yakni *Pulo Inten*, *Bunga Semboja* dan *1001 Malam* (Ardiyanti, 2017, p. 168).

Tahapan ketiga pada tahun 1950-1970 ini, ditetapkan Hari Film Nasional pada tanggal 30 Maret 1950 bertepatan dengan pengambilan gambar pertama dari film *Darah & Doa*. Namun, periode ini memberikan tantangan besar bagi dunia perfilman karena adanya sensor ketat terhadap film yang memiliki isi radikal, sehingga film mengalami penurunan jumlah produksi (Ardiyanti, 2017, p. 168). Memasuki tahapan keempat, 1970-1985, menjadi era emas film Indonesia. Jumlah judul yang muncul mulai meningkat mencapai 618 judul. Beberapa diantaranya menjadi terkenal, seperti *Si Doel Anak Betawi* (1973), *Cinta Pertama* (1973), *Inem Pelayan Sexy* (1977), munculnya *Warkop DKI* dalam film *Mana Tahan* (1979), dan film *Penumpasan Pengkhianatan G30SPKI* yang merupakan alat propaganda pemerintahan Orde Baru ditayangkan pada tahun 1984 (Ardiyanti, 2017, p. 168).

Kemudian, perkembangan film pada tahap kelima, yaitu tahun 1985-1998, mulai bermunculan film yang sarat dengan muatan sensualitas dan seksualitas, seperti film *Nafsu Dalam Cinta*, *Kenikmatan Tabu*, *Susuk Nyi Roro* (Ardiyanti, 2017, p. 168). Dalam hal ini, perempuan digambarkan sebagai sumber godaan dan objek hasrat laki-laki. Pada tahap terakhir, 1998-2013, perfilman Indonesia mulai bangkit. Salah satu yang terkenal dan menjadi simbol kebangkitan di periode ini adalah film *Petualangan Sherina* (Ardiyanti, 2017, p. 168). Perkembangan film pada masa ini dipengaruhi oleh adanya transisi pemerintahan Orde Baru ke Reformasi. Perfilman yang awalnya dikelola oleh Departemen Penerangan dibubarkan dan dialihkan ke Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga membuat generasi muda dapat lebih leluasa memproduksi film dikarenakan

tidak adanya peraturan yang ketat seperti masa sebelumnya. Sejak itu genre perfilman di Indonesia mulai bervariasi (Salsabila & Yulifar, 2022, p. 94).

Dapat dilihat berdasarkan data perkembangan film di atas, bahkan film pertama di Indonesia telah memuat representasi gender yang tidak adil. Laki-laki digambarkan sebagai figur yang kuat dan berani, sedangkan perempuan sosok pasif yang bergantung pada laki-laki. Perempuan kerap ditempatkan dalam peran domestik seperti ibu rumah tangga, istri yang setia, atau anak perempuan yang patuh pada orang tua. Representasi seperti ini tidak hanya memperkuat stereotip gender, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai patriarkal yang kuat dalam masyarakat pada masa itu.

Konstruksi patriarkal yang terus direproduksi melalui film inilah yang menjadi salah satu akar munculnya *rape culture*. Ketika film secara berulang menampilkan perempuan sebagai sosok yang lemah atau tidak memiliki kuasa atas tubuh dan pilihannya, hal tersebut secara tidak langsung membentuk persepsi bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu yang wajar atau dapat dimaklumi. Pada titik ini, Para pembuat film adalah subjek yang memiliki kendali untuk menyampaikan wacana mengenai realitas sosial yang tengah terjadi (Ayustin & Christin, 2022, p. 26003). Film dapat mengekalkan realitas terkait *rape culture* dengan jelas secara mendalam melalui latar waktu, tempat, suasana, alat, sosial yang dipilih, di mana merupakan gambaran kondisi budaya, sosial, hingga konflik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kekerasan seksual yang menimpa perempuan dalam film-film mencerminkan ketimpangan yang telah berlangsung lama dalam relasi kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan ini telah melahirkan diskriminasi yang menghambat serta menghalangi perempuan untuk berkembang maju (Novianty & Burhanudin, 2020, p. 81). Karena pada dasarnya film bukan hanya diinisiasi dari gagasan mentah sutradara yang tidak bersadar tetapi menandakan masih adanya sistem patriarki yang membiarkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan disosialisasikan. Dominasi sistem patriarki inilah yang menjadi akar penyebab tindakan kekerasan seksual. Sistem ini membuat perempuan dilihat hanya sebagai objek nafsu dan sasaran perilaku tidak senonoh (Eddyono et al., 2024, p. 37).

Para pembuat film acap kali mengangkat konteks lokal sebagai bingkai utama dalam menyampaikan nilai budaya, adat, dan tradisi yang ada dalam suatu masyarakat. Melalui cara ini, film memperlihatkan bagaimana konstruksi sosial terhadap perempuan dibentuk dan dipertahankan dalam ruang budaya tertentu. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi dalam film menjadi media utama dalam mempertahankan keberadaan wacana *rape culture*. Melalui film, realitas sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat dapat dikonstruksikan secara spesifik (Alfathoni & Manesah, 2020, p. 25). Dengan menghadirkan konteks lokal, film membuka ruang bagi penonton untuk memahami bagaimana sistem nilai dan struktur sosial tertentu dapat melanggengkan ketimpangan gender serta menormalisasi kekerasan terhadap perempuan.

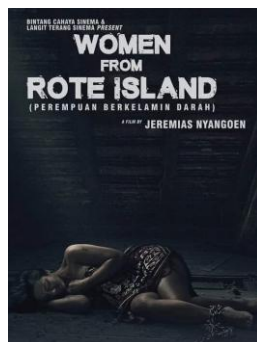
Sejumlah film menampilkan isu *rape culture* dalam konteks adat dan budaya lokal, seperti film *Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak* (2017), yang secara jelas menampilkan kekerasan seksual terhadap perempuan di tengah sistem patriarki masyarakat Sumba, NTT. Kemudian film *Sang Penari* (2011),

menggambarkan bagaimana adat Banyumas, Jawa Tengah, melegitimasi kekerasan seksual melalui ritual “bukak klambu,” di mana keperawanan Srintil sebagai calon ronggeng dilelang kepada laki-laki yang menawar tertinggi.

Adapun film *Women From Rote Island* yang menarik perhatian penulis untuk dijadikan subjek penelitian. Menarik karena banyak perdebatan tentang film ini terkait apakah film ini mutlak memberikan suara bagi penyintas kekerasan seksual atau justru melanggengkan *rape culture* atas nama adat istiadat, karena menghadirkan dinamika kompleks mengenai perempuan yang terperangkap dalam sistem patriarki masyarakat Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di satu sisi menampilkan adanya perlawanan perempuan terhadap struktur yang membatasi, namun di sisi lain menunjukkan bahwasannya perempuan masih berada dalam kontrol laki-laki.

Gambar I. 1

Poster Film *Women From Rote Island*



Sumber: TMDB (2024)

Film *Women From Rote Island* (WFRI) atau *Perempuan Berkelamin Merah* yang disutradai oleh Jeremias Nyangoen dan dirilis pada tahun 2023 mengangkat isu *rape culture* dengan latar sosial budaya di Rote, NTT. Film *Women From Rote Island* menceritakan Martha, seorang perempuan yang mengalami trauma berat

akibat kekerasan seksual yang menimpanya saat menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Malaysia dan di lingkungan tempat tinggalnya Rote, NTT. Dengan harapan mendapat keadilan, Orpha (Ibu dari Martha) dan Bertha (Adik dari Marta) pun malah turut mengalami kekerasan seksual yang dianggap terjadi karena adanya pelanggaran adat istiadat setempat sehingga memperburuk keadaan.

Budaya memiliki peran besar dalam membentuk identitas, nilai, dan cara pandang masyarakat. Di dalamnya tercakup kepercayaan, kebiasaan sosial, serta adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dan harus ditaati (Pellokila et al., 2024, p. 209). Dalam konteks film ini, latar sosial budaya yang digunakan dalam film ini ialah Pulau Rote, NTT yang masih sangat kental dengan tradisi dan adat istiadat. Kuatnya pengaruh adat menjadikan sistem patriarki sangat dominan di sana. Rokhmansyah menegaskan bahwa patriarki berangkat dari istilah “patriarkat” yang merujuk pada formasi di mana laki-laki memegang posisi sebagai penguasa utama, pusat dan segalanya (Sumakud & Septyana, 2020, p. 78).

Patriarki di Rote terlihat dari adanya struktur sosial di setiap suku atau *Leo*. Tiap-tiap *Leo* memiliki satu pemimpin yang menjabat sebagai *Maneleo*. Orang yang menduduki jabatan ini biasanya diartikan sebagai raja atau kepala dalam *Leo* tersebut. Jabatan ini cenderung selalu berada di tangan laki-laki. Struktur sosial ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa terdapat ketimpangan, di mana laki-laki diposisikan sebagai pemangku kekuasaan dan memiliki derajat lebih tinggi dari perempuan.

Sistem sosial masyarakat Rote sendiri bersifat patrilineal dan patriarkal, di mana peran laki-laki sangat dominan dalam pengambilan keputusan adat, termasuk urusan perkawinan dan pembayaran belis, yang sepenuhnya berada di bawah kendali tokoh laki-laki seperti *To 'ok* dan *Maneleo* (Pellokila et al., 2024, p. 210). Meskipun secara nilai belis dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, praktiknya justru memperkuat dominasi laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi yang bergantung pada keputusan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bagaimana adat dan struktur sosial di Rote berperan dalam melanggengkan relasi kuasa yang timpang. Ketimpangan ini tampak dalam ruang penentuan jumlah belis. Perempuan memang dapat hadir dalam musyawarah tersebut, namun kehadiran mereka bersifat simbolis karena tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan (Pellokila et al., 2024, p. 211).

Adat istiadat di Rote dapat dikatakan bersinggungan erat dengan konsep gender karena berkaitan dengan ketidakadilan yang dialami individu berdasarkan jenis kelaminnya. Gender merupakan gagasan sosial dan budaya yang membedakan laki-laki dan perempuan, termasuk karakteristik maskulin dan feminin yang ditanamkan dalam diri mereka untuk saling membedakan satu sama lain (Rahmawati, 2019, p. 3). Feminim sering dipersepsikan sebagai rapuh, lemah, dan tidak berdaya menjadikan perempuan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual. Alasan perempuan selalu menjadi sasaran empuk korban kekerasan dikarenakan perempuan selalu berada dalam kendali dan kekuasaan laki-laki (Mulyani Try et al., 2023, p. 174). Tergambar dari film WFRI, masyarakat Rote mengandalkan peran *Maneleo* untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan.

Tergambarkan dalam *scene* keputusan mengurung Martha yang diputuskan oleh *Maneleo* yang dimana seluruhnya merupakan laki-laki. Ini dapat dianggap bahwa peran gender laki-laki di Rote mempunyai posisi dominan, sementara perempuan tidak perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Penggambaran *rape culture* yang dibalut dalam konteks adat istiadat, budaya, dan sosial membuka ruang untuk dianalisis lebih lanjut. Melihat bagaimana film ini membentuk wacana tentang *rape culture* dalam masyarakat Rote NTT yang kental dengan nilai patriarki. Karena pada dasarnya, setiap film yang mengangkat isu perempuan pastinya tidak terlepas dari adanya pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara entah terkait memperkuat atau menentang ideologi patriarki. Ideologi dapat dipraktikkan atau dicerminkan dalam teks, percakapan, dan lainnya (Eriyanto, 2015, p. 13).

Bagaimana perempuan di tampilkan dalam film ini menjadi menarik untuk diteliti dengan menggunakan analisis wacana kritis. Kajian wacana biasanya diterapkan untuk meneliti teks agar dapat memahami makna yang termuat didalamnya (Andriana & Manaf, 2022, p. 74). Teks tidak hanya dibatasi pada kata-kata yang tertulis di lembar kertas, tetapi mencakup berbagai bentuk ekspresi komunikasi, seperti gambar, efek suara, ucapan, musik, citra, dan sebagainya (Masitoh, 2020, p. 69). Penulis akan menelaah teks melalui *scene*, dialog, interaksi antar aktor untuk mengungkap siapa yang menjadi subjek dan objek dari pesan *rape culture* yang diwacanakan dalam film *Women From Rote Island*.

Analisis wacana kritis yang dirasa cocok dalam mengkritisi pesan *rape culture* dalam penelitian ini adalah model analisis wacana kritis milik Sara Mills. Teori wacana Sara Mills fokus pada analisis wacana dari kacamata feminis. Mills mengemukakan bahwa sudut pandang feminis yang dimaksud adalah sudut pandang yang memfokuskan perhatian pada bagaimana seorang perempuan digambarkan dalam cerita oleh penulis cerita (Sariasih et al., 2023, p. 541). Teori ini membantu penulis dalam melihat bagaimana perempuan dipetakan.

Dalam buku Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media (Eriyanto, 2015, p. 200) menjelaskan bahwa model Sara Mills ini melihat posisi masing-masing berada dalam aktor dalam teks, dengan mengidentifikasi siapa yang berperan menggerakkan cerita (subjek) dan siapa yang hanya berperan sebagai objek yang diceritakan. Wacana kritis Sara Mills juga melihat dari sudut pandang penulis dan pembaca di mana menekankan bagaimana pembaca menempatkan dirinya pada teks tersebut. Mills menyatakan bahwa teks merupakan produk dari adanya persetujuan bersama antara penulis dan pembaca (Ramadhani & Adiprabowo, 2023, p. 326). Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang menekankan pada pemahaman dan penafsiran makna dari fenomena yang dipelajari. Deskriptif kualitatif adalah pendeskripsian data secara akurat, faktual, dan sistematis. Tujuan pendeskripsian ini, yakni untuk menelusuri lebih jauh tentang makna data, seperti alasan di balik realitas sosial yang ada, motivasi pelaku sosial, latar belakang yang mempengaruhi motivasi dan pengaruh konteks lain (Kriyantono, 2020, p. 62).

Penulis dalam penelitian ini akan melihat wacana *rape culture* di film *Women From Rote Island* dalam tiga tingkatan piramida, yaitu *normalization* (Pewajaran), *degradation* (Merendahkan), dan *assault* (Kekerasan Gamblang). Yang pertama, *normalization*. Pada tahap ini masyarakat mewajarkan ideologi atau pikiran bahwa posisi perempuan tidak sebanding dengan laki-laki yang kemudian diimplementasikan melalui perilaku seksis, candaan tentang perkosaan dan lain sebagainya yang dianggap biasa. Kedua, *degradation* yang di mana merupakan tindakan menjatuhkan atau merendahkan martabat perempuan, contohnya *catcalling* dan *victim blaming*. Yang terakhir, *assault*. Pada tahap *assault* terjadi kekerasan yang mengerikan dengan merampas hak otoritas tubuh perempuan serta serangan fisik dan mental, contohnya menganiaya secara seksual, memanipulasi, pemaksaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan (Amadea, 2022).

Kekerasan seksual yang terjadi secara gamblang pada perempuan bukan sepenuhnya berasal dari jenis kelamin mereka tetapi juga berkaitan erat dengan adanya relasi gender antara perempuan dan laki-laki yang tidak terlepas dari keberadaan kekuasaan yang mengikat keduanya (Palulungan et al., 2020, p. 28). Film tak henti-henti menyajikan perempuan tidak berdaya dalam konteks dominan sosial patriarki dengan spesifikasi perempuan sering kali berada di pihak yang dirugikan. Masyarakat patriarkal menganggap seks sebagai aspek utama dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi (Muliawan, 2021, p. 54). Adanya kesenjangan kekuasaan, di mana satu pihak berupaya menguasai atau mengontrol pihak yang lain.

Hingga saat ini, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi kekerasan seksual terhadap perempuan, yakni penelitian milik seperti Permatasari & Amalia (2022), Nirmala & Zuhri (2023), Eddyono et al. (2024), dan Mulyani et al. (2023). Penelitian-penelitian ini menekankan perempuan sebagai korban yang tidak berdaya, sering dianggap bersalah atau aib, baik di ranah kampus maupun dunia digital. Kemudian penelitian lain menekankan perlawanan perempuan dalam melawan patriarki dan ketidakadilan sosial, meliputi Sumakud & Septyana (2020), Lesmana & Valentina (2022), Ramadhani & Adiprabowo (2023), Kaestiningtyas et al. (2021), dan Ayustin & Christin (2022), yang menampilkan pemberdayaan perempuan sebagai subjek, menghadapi marginalisasi, stereotip, dan beban ganda, serta memperjuangkan hak dan keadilan sosial.

Beberapa penelitian juga menyoroti bias gender dan normalisasi kekerasan seksual dalam media massa, yakni Adiyanto & Sabrina (2023), Novianty & Burhanudin (2020), Muliawan (2021), dan Angi et al. (2023). Terakhir, penelitian terkait marginalisasi perempuan dalam sastra dan terjemahan *subtitle* film, yaitu ndriana & Manaf (2022), Sariasih et al. (2023), dan Nugroho & Rakhman (2022).

Sama halnya dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini juga mengkaji dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Namun, penulis mendapati dari penelitian di atas tidak ada satupun yang menganalisis dengan pemetaan kekerasan seksual yang komprehensif menggunakan piramida *rape culture* milik Jaime dan Cervix. Sehingga penulis berharap nantinya penelitian ini dapat menelanjangi secara gamblang melalui tiga tingkatan *rape culture*, yakni

normalization, *degradation*, dan *assault*. Dengan melihat posisi subjek, objek, pembaca di dalamnya akan menghasilkan analisis yang akurat.

Kemudian subjek penelitian adalah film *Women From Rote Island*, yang ditelaah dalam konteks kelokalan adat sebagai representasi *rape culture*, menyoroti bagaimana nilai, tradisi, dan struktur sosial adat membungkus kekerasan seksual sehingga tampak normal. Film ini sendiri juga masih jarang diteliti, sehingga dapat menambah wawasan kajian penelitian terhadap teks media film.

I.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan jabaran latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, bagaimana *rape culture* dalam film *Women From Rote Island*?

I.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *rape culture* dalam film *Women From Rote Island*

I.4 Batasan Masalah

I.4.1 Subjek Penelitian

Film *Women From Rote Island* menjadi subjek dalam penelitian ini.

I.4.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengkaji *rape culture* dalam film *Women From Rote Island* sebagai objek dalam penelitian.

I.5 Manfaat Penelitian

I.5.1 Manfaat Akademis

Penulis berharap pengkajian ini mampu memperkaya wawasan kajian ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya terkait kajian penelitian analisis wacana kritis terutama dengan menggunakan model Sara Mills mengenai *rape culture* yang terkandung dalam film. Serta diharapkan mampu menjadi acuan bagi siapa saja yang membutuhkan referensi terkait wacana *rape culture* dalam film.

I.5.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap pengkajian ini bisa mengevaluasi bagaimana *rape culture* ditampilkan dalam film sehingga masyarakat bisa lebih memahami dampak *rape culture* terhadap cara berpikir dan berperilaku sehari-hari. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan individu bisa lebih reflektif dalam melihat isu gender di sekeliling mereka. Selain itu, kajian ini juga bisa membuka ruang diskusi yang lebih luas lagi terkait gender, baik di media maupun dalam praktik sosial secara keseluruhan.